

**ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

OLEH:

AISYAH FADILA SULTHANI

1410841006



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2019

ABSTRAK

Aisyah Fadila Sulthani, No. BP 1410841006, Analisis Formulasi Kebijakan Hutan Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, 2019. Dibimbing oleh: Rozidateno Putri Hanida S.IP, M.PA dan Roza Liesmana S.IP, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 140 halaman dengan referensi 11 buku teori dan 5 buku metode, 1 Undang-undang, 1 Peraturan Menteri, 1 Peraturan Direktur Jenderal, 2 Surat Keputusan Menteri, 1 Peraturan Daerah, 1 Naskah Akademik, Daerah 2 Skripsi, 1 Jurnal.

Penelitian ini menganalisis bagaimana proses formulasi kebijakan hutan adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kajian ini dilatar belakangi oleh kebijakan-kebijakan dikeluarkan pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat hukum adat seperti kebijakan tentang penetapan kawasan hutan, pemberian izin konsesi hutan di Mentawai oleh pemerintah kepada beberapa perusahaan sehingga menyebabkan masyarakat hukum adat Mentawai kehilangan hak dalam pengelolaan hutan. Kondisi ini yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian ini.

Penelitian ini peneliti menggunakan teori Analisis Kebijakan William N Dunn, terdapat lima tahapan analisis kebijakan menurut William N Dunn yaitu merumuskan masalah, peramalan kebijakan, rekomendasi kebijakan, pemantauan kebijakan, dan penilaian kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, observasi. Kemudian untuk menguji temuan peneliti dilapangan, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi teknik dan sumber .

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan dari teori yang dikemukakan William N Dunn adalah (1) Merumuskan Masalah Kebijakan, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat telah melakukan perumusan masalah terhadap permasalahan hutan adat di Mentawai, (2) Peramalan Kebijakan, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat telah melakukan peramalan kebijakan apabila dilakukan penetapan hutan adat di Mentawai, (3) Rekomendasi, aksi kebijakan yang dipilih adalah dengan membuat peraturan daerah pengakuan masyarakat adat, (4) Pemantauan Kebijakan, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat melakukan pemantauan terhadap kepatuhan masyarakat hukum adat dalam penetapan hutan adat, (5) Evaluasi Kebijakan, terdapat ketidak sesuaian antara keinginan yang dicapai yaitu penetapan hutan adat dengan proses yang terjadi

Kata kunci: analisis formulasi kebijakan, hutan adat, masyarakat hukum adat

ABSTRACT

Aisyah Fadila Sulthani, No. BP 1410841006, Analysis of Formulation of Indigenous Forest Policy in Mentawai Islands District, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang 2019. Supervised by: Rozidateno Putri Hanida S.IP, M.PA and Roza Liesmana S.IP, M.Sc. This thesis consists of 150 pages with references to 11 theory books and 5 method books, 1 laws, 1 ministerial regulations, 1 general director's regulation, 2 ministerial decrees, 1 regional regulation, 1 Academic Script, 2 thesis, 1 journal.

This study analyzes how the process of formulation of customary forest policies in the Mentawai island district. This study was motivated by policies issued by the government that did not favor indigenous peoples, such as the policy on determining forest areas, granting forest concession permits in Mentawai to several companies, causing the Mentawai indigenous people to lose their rights in forest management. This condition makes researchers interested in doing this research.

This study researchers used William N Dunn's Policy Analysis theory, there are five stages of policy analysis according to William N Dunn, namely formulating problems, forecasting policies, monitoring policies, and policy assessments. The method used in this study is qualitative descriptive. Data collection techniques used are interview, documentation, observation. Then to test the findings of researchers also used triangulation techniques and sources.

The results of the field research show that the theory put forward by William N Dunn is (1) Formulating Policy Issues, local governments and non-governmental organizations have formulated problems regarding the customary forest problems in Mentawai, (2) Policy Forecasting, local government and non-governmental organizations policy forecasting when the customary forest in Mentawai is determined, (3) Recommendations, the policy action chosen was to make regional regulations for recognition of indigenous peoples, (4) Policy Monitoring, local government and non-governmental organizations monitoring the compliance of customary law communities in the establishment of customary forest, (5) Policy Evaluation, there is a discrepancy between the desires achieved, namely the establishment of customary forest with the processes that occur.

Keywords: analysis of policy formulations, customary forest, customary law communities